



**BNPB**

KONSEP PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI

# KELENGKAPAN DOKUMEN RENCANA KONTINGENSI

**PELATIHAN PERENCANAAN KONTINGENSI**



# Dr. Marlina Adisty, M.Si

WIDYAIISWARA PUSDIKLAT PB, BNPB

Widyaiswara Ahli Madya pada Pusdiklat PB, BNPB  
Lahir di Jakarta, 30 Maret 1981  
Menikah dengan Dr. Marsudi, SE, M.Si (3 anak)  
Latar belakang pendidikan S1 (UNPAD), S2-S3 (UI)

Spesialisasi :  
Manajemen Bencana, *Disaster and Development*,  
Pemberdayaan Masyarakat, JITUPASNA



marlinaadisty@gmail.com



081283810059



@ Marlina Adisty

# Merangkai Puzzle Perencanaan Penanggulangan PB Per Kelompok

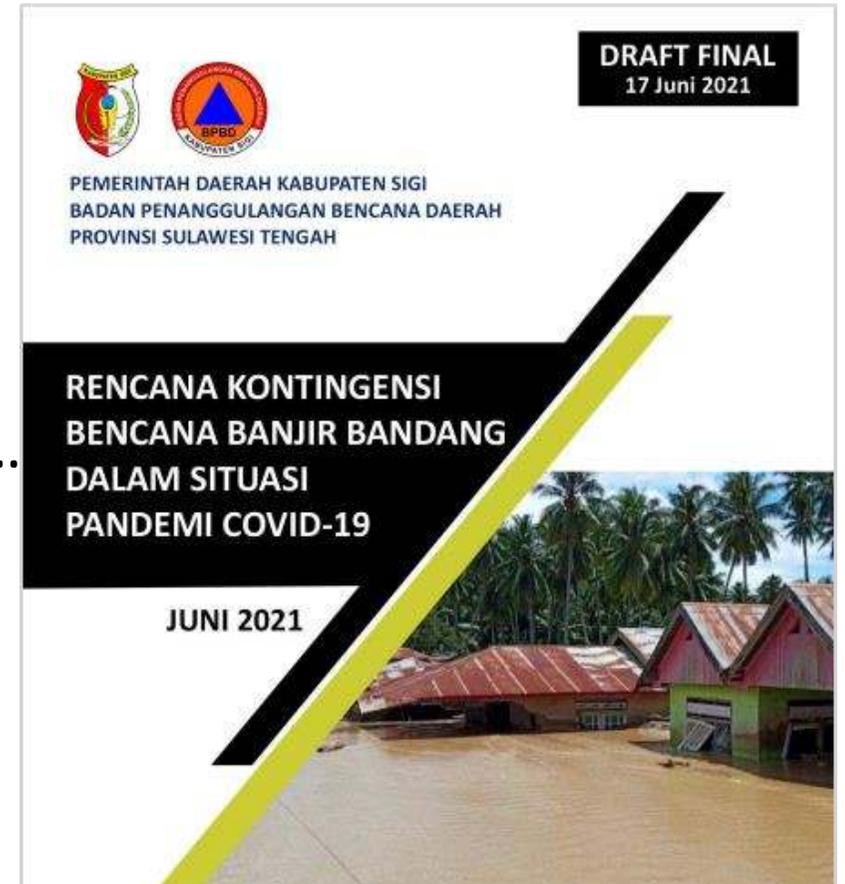
ASPEK	RPKB	RENKON	RENOPS	RENAKSI PDB
Kapan	Keadaan <b>normal</b>	Ada <b>indikasi ancaman</b> atau bahaya	Pada saat ditetapkan <b>status darurat</b>	Pada saat <b>tanggap darurat</b>
Cakupan	Semua ancaman, umum	Satu ancaman tertentu	Ancaman yang telah menjadi bencana	Aspek khusus dari kejadian kedaruratan
Pelibatan	Semua pihak yang <b>dapat</b> terlibat	Pihak yang <b>diperkirakan</b> akan terlibat	Pihak yang <b>diperlukan</b> untuk terlibat	Pelaku / unit tertentu dan pihak-pihak yang <b>harus melaksanakan</b> tugas
Durasi	Jangka panjang	Jangka waktu tertentu	Sesuai keadaan	Sesuai perintah,
Sifat	Perkiraan	Terukur	Spesifik / Tertentu	Rinci , Terbatas
Muatan	Kerangka normatif	Kerangka kerja	Rencana gerak	Perintah gerak
Tataran	Pemerintah umum	Pihak pelaksana tanggap darurat	Komandan operasi	Pelaksana Tugas



# FORMAT DOKUMEN RENKON

**Format** cover depan meliputi :

- Logo Kab/Kota
- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota .....
- Provinsi .....
- **Rencana Kontingensi** .....
- Disusun Tahun



# Format Isi Rencana Kontingensi Bencana



## 1. PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Landasan Hukum
- c. Kebijakan dan Strategi
- d. Maksud dan Tujuan
- e. Ruang Lingkup

## 2. SITUASI JENIS BAHAYA, SKENARIO KEJADIAN DAN ASUMSI DAMPAK

- a. Karakteristik Bahaya
- b. Skenario Kejadian
- c. Asumsi Dampak

## 3. TUGAS POKOK

- d. Tugas Pokok
- e. Sasaran

## 4. PELAKSANAAN

- a. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan
- b. Struktur Organisasi Komando
- c. Kegiatan Pokok
- d. Tugas-Tugas Bidang-Bidang
- e. Instruksi Koordinasi

## 5. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

- a. Administrasi
- b. Logistik
  1. Perkiraan Ketersediaan Sumberdaya
  2. Proyeksi Kebutuhan Sumberdaya
  3. Strategi Pemenuhan Sumberdaya

## 6. PENGENDALIAN

- a. Komando
- b. Kendali
- c. Koordinasi
- d. Komunikasi
- e. Informasi

## 7. DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran-1: Susunan Pelaksana Tugas  
Lampiran-2: Jaring Komunikasi  
Lampiran-3: Album Peta  
Lampiran-4: Strategi Evakuasi  
Lampiran-5: Prosedur Tetap  
Lampiran-6: Lembar Komitmen  
Lampiran-7: Berita Acara Penyusunan Rencana Kontingensi  
Lampiran-8: Profil dan Sumberdaya Organisasi



*Format Isi Rencana Kontingensi Bencana*

# BAB 1. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

**Penjelasan tentang mandat dan Urgensi (Kemendesakan)** penyusunan Renkon terkait dengan adanya **potensi bencana dengan tingkat klasifikasi tinggi** dan tingkat klasifikasi kerentanan tinggi serta tingkat klasifikasi kapasitas rendah, berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang telah tersusun di daerah setempat. Berisi tentang penunjukan pejabat yang ditugasi, rekan dan mitra yang terlibat dalam penyusunannya. Juga kedudukan dokumen dalam hierarki peraturan terkait penanggulangan bencana.

**Bagian ini juga menjelaskan konsekuensi dari dokumen Rencana Kontingensi terhadap rencana kerja dan penganggaran pemerintah daerah serta keterlibatan parapihak.**



*Format Isi Rencana Kontingensi Bencana*

# BAB 1. PENDAHULUAN

## B. Landasan Hukum

Mengingat bahwa kegiatan perencanaan kontingensi dan dokumen yang dihasilkannya merupakan produk resmi dan berlandaskan ketentuan peraturan perundangan, maka perlu digambarkan secara singkat perangkat kerangka peraturan perundangan.

**Bagian ini akan menentukan status dan kekuatan dari dokumen** yang dihasilkan dari kegiatan perencanaan ini dan, pada sisi yang lain, menyediakan dasar dari kerangka kebijakan yang dikembangkan pada bagian berikutnya dalam proses perencanaan kontingensi.



*Format Isi Rencana Kontingensi Bencana*

# BAB 1. PENDAHULUAN

## **B. Landasan Hukum (*lanjutan ...*)**

Pada bagian ini jika memungkinkan diberikan penekanan terkait pentingnya kelembagaan dan peraturan untuk “AKTIVASI RENKON”, dengan alur sbb:

- Kelembagaan dan Peraturan terkait Aktivasi EWS
- Kelembagaan dan Peraturan terkait Aktivasi Tim Reaksi Cepat / Pengkajian Cepat (PB)
- Kelembagaan dan Peraturan terkait Aktivasi Rekomendasi Penetapan Status PDB
- Kelembagaan dan Peraturan terkait Aktivasi SK – PDB
- Kelembagaan dan Peraturan terkait Aktivasi Renkon menjadi RENOPS dan Perintah Operasi
- Kelembagaan dan Peraturan terkait Aktivasi Protokol Kesehatan

# BAB 1. PENDAHULUAN



## **C. Kebijakan**

Tanggap darurat mewujudkan pemberian hak masyarakat (yang dijamin dalam UU Penanggulangan Bencana), yakni mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana; dimana setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Prinsip-prinsip penanggulangan bencana yakni cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna; transparansi dan akuntabilitas; kemitraan, pemberdayaan, nondiskriminatif, dan nonproseliti.

*Format Isi Rencana Kontingensi Bencana*

# BAB 1. PENDAHULUAN



## **D. Strategi**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi: pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; penentuan status keadaan darurat bencana; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

*Format Isi Rencana Kontingensi Bencana*

# BAB 1. PENDAHULUAN



## **E. Maksud dan Tujuan**

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada pemangku kepentingan dalam menyusun rencana kontingensi menghadapi ancaman bencana agar sesuai dengan syarat, kriteria dan aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuannya agar dapat merespon kejadian bencana secara cepat, tepat dan efektif.

*Format Isi Rencana Kontingensi Bencana*

# BAB 1. PENDAHULUAN



## **F. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam pedoman ini mencakup definisi, pengertian, konsep dan tata laksana serta jenis kegiatan lanjutan yang dilakukan. Pedoman ini dapat digunakan untuk situasi bencana tunggal, simultan dan/atau kolateral (ikutannya).

Penyusunan rencana kontingensi dikoordinasikan oleh BNPB dan/atau BPBD serta pemerintah daerah.

## BAB 2. BAHAYA, SKENARIO KEJADIAN, DAN ASUMSI DAMPAK

Skenario kejadian disusun berdasarkan data ilmiah dan potensi bencana terbaru. Skenario kejadian dikembangkan oleh pemangku kepentingan dengan memperhatikan masukan dari narasumber atau pakar yang kompeten dibidangnya serta mempertimbangkan sejarah kebencanaan.

Tabel 3.1 Pokok-Pokok Ringkasan Skenario Kejadian

Pokok Bahasan	Penjelasan/Rincian
Asumsi waktu kejadian	
Lokasi	
Durasi	
Bahaya primer	
Intensitas bahaya primer	
Cakupan wilayah terdampak	
Jumlah penduduk dalam cakupan wilayah diatas	
Bahaya sekunder	
Intensitas bahaya sekunder	
Cakupan wilayah terdampak bahaya sekunder	
Jumlah penduduk dalam cakupan wilayah di atas	

# Asumsi Dampak

- Asumsi dampak bencana dapat dikembangkan berdasarkan peta risiko atau peta bahaya,
- mempertimbangkan aspek kerentanan dan kapasitas publik/ swasta/komunitas yang terkena dampak bencana.
- Berupa Dampak lingkungan, kependudukan, ekonomi, infrastruktur/fisik, dan layanan sipil pemerintahan.
- Dapat berupa asumsi terburuk berdasarkan sejarah kejadian, atau asumsi yang paling mungkin terjadi.

Asumsi Dampak Kejadian Primer	
1.Aspek kependudukan	Catatan: Asumsi besar korban dapat didasarkan pada jumlah korban/ penyintas pada bencana yang pernah terjadi. Mempertimbangkan waktu kejadian (pagi/siang/malam)
	Jumlah Penduduk Terdampak: Jumlah Penduduk Per-Kecamatan, Desa/ Kelurahan, Dusun
	Meninggal dunia: (Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun)
	Mengungsi: (Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun)
	Luka-luka: (jumlah total dari berikut) Luka berat: Luka sedang: Luka ringan:
	Pendatang Terdampak WNI: WNA:

# BAB 3. Tugas Pokok

- **Tugas pokok** yang dimaksud adalah tugas pokok organisasi komando penanganan darurat bencana di dalam operasi tanggap darurat yang telah ditentukan yang dipedomani oleh dokumen renkon dimaksud.

## 2 TUGAS POKOK

Sistem komando penanganan darurat bencana banjir bandang Kabupaten Sigi didefinisikan sebagai satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penangan darurat bencana secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman bencana banjir bandang dan menaggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.

Secara umum tujuan operasi penanganan darurat bencana adalah untuk pemulihan fungsi-fungsi fasilitas umum serta perekonomian sehingga kehidupan masyarakat dapat menjadi normal kembali. Adapun tujuan khusus operasi penanganan darurat bencana adalah untuk melakukan evakuasi dan penyelamatan korban di daerah terdampak bencana banjir bandang. Implementasi operasi penanganan darurat bencana banjir bandang dilaksanakan oleh dengan sistem komando tanggap darurat. Tugas komando keadaan darurat adalah melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan keadaan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi serta melakukan koordinasikan instansi/lembaga terkait.

Komando Darurat Bencana Banjir Bandang Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, melaksanakan operasi darurat bencana dimulai dari siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat menuju pemulihan selama 20 hari secara terpadu: penanganan menyeluruh masyarakat terdampak secara cepat dan tepat, memulihkan sarana dan prasarana vital, dan menjamin kestabilan ekonomi dengan memaksimalkan sumberdaya daerah dan memperhatikan situasi Pandemi COVID-19.

## BAB 3. Tugas Pokok

- **Sasaran:** Bagian ini mendaftarkan proyeksi capaian kerja yang dinyatakan secara terukur. Sasaran merupakan terjemahan tujuan operasi, tetapi sudah diturunkan menjadi dimensi jumlah, persentase yang akan dihasilkan dari berbagai tindakan yang akan dilaksanakan pada tahap-tahap penanganan kedaruratan.

Tabel 3. Konsep Operasi

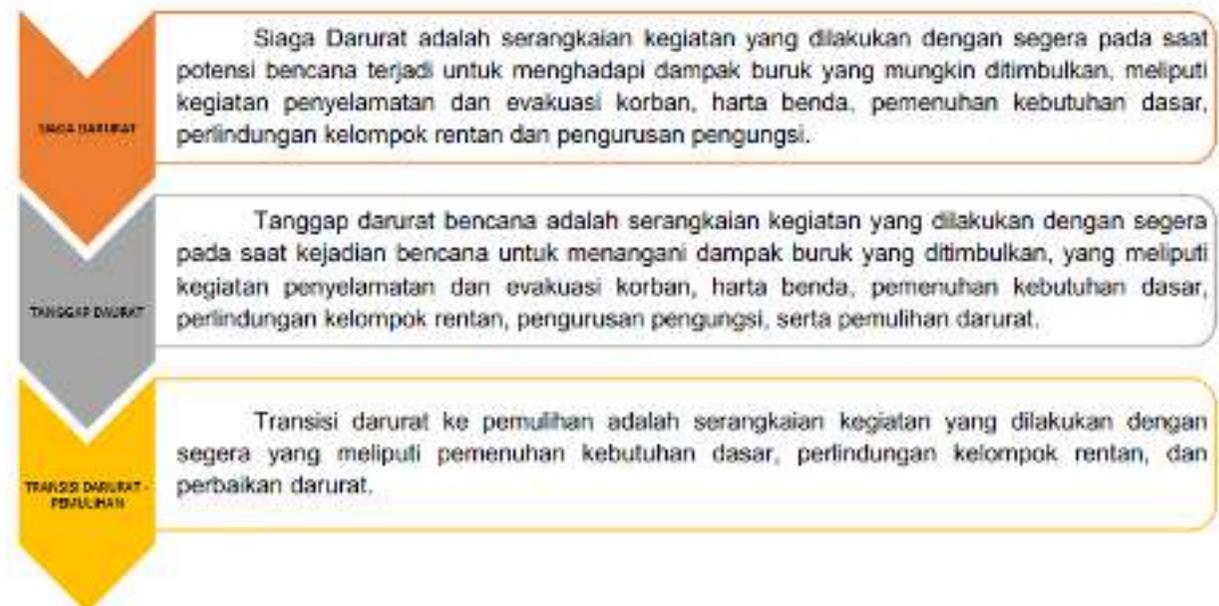
SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI KE PEMULIHAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Diseminasi informasi peringatan dini dan peningkatan status WASPADA.</li><li>2. Pengkajian cepat oleh tim TRC.</li><li>3. Penetapan Status Darurat Bencana melalui Surat Keputusan Bupati.</li><li>4. Aktivasi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi PDR.</li><li>5. Aktivasi Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi (PPE) prioritas pada korban luka parah dan kelompok rentan.</li><li>6. Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemulihan segera sarana dan prasarana vital (listrik, air bersih, telekomunikasi dan ketersediaan BBM).</li><li>2. Pemenuhan kebutuhan dasar.</li><li>3. Perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, lansia, balita, dan disabilitas).</li><li>4. Aktivasi respon terhadap keamanan dan keselamatan.</li><li>5. Konsep operasi siaga darurat tetap menerapkan protokol kesehatan COVID 19.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kaji kebutuhan pasca bencana.</li><li>2. Memastikan unit operasional dan unit pelaksana menyusun perencanaan transisi darurat banjir bandang:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Menyusun rencana pemulangan penyintas ke tempat tinggal asal dengan memenuhi prosedur transisi darurat sesuai dengan regulasi.</li><li>b. Menghimpun dan menyiapkan dukungan prasarana dan sarana dengan melibatkan stakeholder terkait.</li></ol></li></ol>

## Bab 4. Pelaksanaan Penanganan Darurat

### a. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan

- Memuat ruang lingkup operasi tanggap darurat dan rencana tindakan yang akan dilakukan dalam kerangka waktu yang telah ditentukan (periode operasi). Tindakan ini fokus pada tanggap darurat – dan fase (tahapan) tanggap darurat yang sesuai skenario kejadian.

**Gambar 1 Kerangka Penanggulangan Kedaruratan Bencana Penjabaran Umum Tahapan (fase)**



## a. Sasaran Tindakan

**Tabel 3.3 Sasaran Tindakan**

<b>Tahap**</b>	<b>Tindakan*</b>
A.Siaga Darurat	..... ..... ..... dst
B.Tanggap darurat	..... ..... ..... dst
C.Transisi darurat	..... ..... ..... dst

## b. Struktur Organisasi Komando Peangangan Darurat

---



### c. Kegiatan Pokok Penanganan Darurat

Untuk mencapai seluruh sasaran tindakan, organisasi menurunkan setiap pekerjaan dari masing-masing fungsi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang harus dijalankan setiap Fungsi dan bidang/unit dibawahnya. Pastikan bahwa seluruh tindakan yang ditetapkan sebagai sasaran operasi dapat tercapai.

Tindakan	Kelompok Kegiatan	Kegiatan
.....	Kegiatan Prioritas	.....
		.....
		dst
	Kelompok Kegiatan Lain	.....
		.....
		dst
.....	Kegiatan Prioritas	.....
		.....
		dst
	Kelompok Kegiatan Lain	.....
		.....
		dst

## d. Tugas Bidang

---

Fungsi	Penjabaran Tugas	Fungsi/Sub-Bidang/Unit	Penjabaran Tugas
1. Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi	.....	Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi	.....
		Sekretariat dan Hubungan Masyarakat (Humas)	.....
		Keamanan dan Keselamatan	.....
		Penghubung (perwakilan institusi)	.....

## e. Instruksi Koordinasi

Memuat arahan/perintah/pokok-pokok mandat kepada organisasi komando penanganan darurat bencana yang diberikan oleh otoritas, atau komandan kepada seluruh fungsi/sub-bidang/unit dalam organisasi

# BAB 5. Administrasi dan Logistik

## a. Administrasi

- Memuat mekanisme pengaturan biaya dan pemenuhan kebutuhan logistik yang digunakan dalam melaksanakan operasi Penanganan Darurat Bencana, termasuk pembagian peran dan tanggung jawab Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional terkait pembiayaan PKB.

# 5. Logistik

No.	Tugas/Kegiatan	Kategori	Sumberdaya		Keterangan**		
			Jenis	Kemampuan*	Ketersediaan	Estimasi Kebutuhan	Kesenjangan
		Manusia:					
		Peralatan:					
		Bahan/Sediaan:					

\*) Spek    \*\*) Termasuk informasi pemilik dan lokasi sumberdaya, misalnya

# Bab 6. Pengendalian

- Manajemen darurat dan respon keadaan darurat bergantung pada sistem komunikasi dan informasi yang menyediakan gambaran operasi bersama kepada semua lokasi komando dan koordinasi. Termasuk persyaratan yang dibutuhkan untuk rencana kerja yang baku untuk komunikasi - menekankan pada kebutuhan akan gambaran operasi bersama.
- KOMANDO
- KENDALI
- KOORDINASI
- KOMUNIKASI

*Format Isi Rencana Kontingensi Bencana*

## 7. DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN



- Lampiran-1: Susunan Pelaksana Tugas
- Lampiran-2: Jaring Komunikasi
- Lampiran-3: Album Peta
- Lampiran-4: Strategi Evakuasi
- Lampiran-5: Prosedur Tetap
- Lampiran-6: Lembar Komitmen
- Lampiran-7: Berita Acara Penyusunan Rencana Kontingensi
- Lampiran-8: Profil dan Sumberdaya Organisasi



*Format Isi Rencana Kontingensi Bencana*

## 7. DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran susunan pelaksana tugas

Bagian ini menampilkan kembali struktur fungsi/sub-bagian/unit dan memberikan keterangan bagaimana pembagian organisasi pelaksanaannya. Setiap fungsi/subbagian/unit memiliki pemimpin (lead) dan pendukung (co-lead) tugas.

Format penulisan dapat berbentuk tabel dengan pengesahan tandatangan kepala daerah atau yang diberi kewenangan.



Format Isi Rencana Kontingensi Bencana

## 7. DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran susunan pelaksana tugas

No.	FUNGSI/SUB-BAGIAN/UNIT*	ORGANISASI
1.	.....	
	Pemimpin/Koordinator	: .....
	Pendukung	: ..... ..... .....
2	.....	
	Pemimpin/Koordinator	: .....
	Pendukung	: ..... ..... .....
	Dst.	

\*Sesuai dengan Struktur Organisasi



*Format Isi Rencana Kontingensi Bencana*

## 7. DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

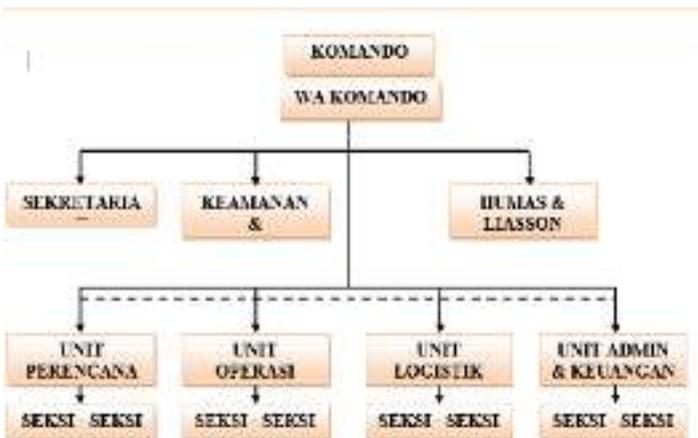
### Lampiran jaring komunikasi

Bagian ini menampilkan jaring komunikasi sistem komando penanganan bencana yang telah disepakati sebelumnya (Bab 3 – Tugas Pokok - b. Struktur Organisasi Komando Peanganan Darurat).

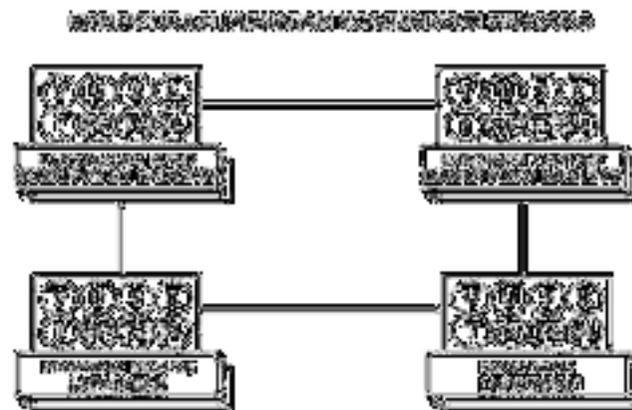


Format Isi Rencana Kontingensi Bencana  
 7. DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN  
 Lampiran jaring komunikasi

Contoh Jaring Komunikasi Organisasi Penanggulangan Bencana Kabupaten



- Frekuensi utama: 1. 170.300 Mhz RX (BPD BADUNG)  
 2. 165.300 Mhz TX (BPD BADUNG)
- frekuensi cadangan: 1. 142.280 Mhz RX (RAPI BADUNG)  
 2. 142.880 Mhz TX (RAPI BADUNG)



REPERFORUM: ...  
 ...  
 ...  
 ...



## 7. DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran peta-peta



Pada bagian ini tampilkan peta peta penting seperti di bawah ini :

- Peta skenario wilayah terdampak
- Peta jalur evakuasi desa (untuk desa yang terdampak berdasarkan skenario)
- Peta sebaran infrastruktur terdampak
- Peta satuan pendidikan terdampak
- Peta fasilitas kesehatan terdampak
- Peta Rencana Operasi yang memuat (Rencana lokasi shelter pengungsi, Lokasi RS Darurat, Lokasi Sekolah Dasar Darurat, Lokasi Posko Utama, Lokasi Pendaratan Helikopter, Lokasi Gudang Logistik, Lokasi Pemakaman Massal dan Lokasi lainnya yang dibutuhkan dalam mendukung operasi dan lokasi lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung operasi.

## 7. DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran peta-peta



Pada bagian ini tampilkan peta-peta penting seperti di bawah ini :

- Peta skenario wilayah terdampak
- Peta jalur evakuasi desa (untuk desa yang terdampak berdasarkan skenario)
- Peta sebaran infrastruktur terdampak
- Peta satuan pendidikan terdampak
- Peta fasilitas kesehatan terdampak
- Peta Rencana Operasi yang memuat (Rencana lokasi shelter pengungsi, Lokasi RS Darurat, Lokasi Sekolah Dasar Darurat, Lokasi Posko Utama, Lokasi Pendaratan Helikopter, Lokasi Gudang Logistik, Lokasi Pemakaman Massal dan Lokasi lainnya yang dibutuhkan dalam mendukung operasi dan lokasi lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung operasi.



Format Isi Rencana Kontingensi Bencana  
7. DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN  
Lampiran peta-peta



## 7. DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran sop (prosedur tetap)



- Daftarkan dan sajikan seluruh prosedur tetap yang diperlukan untuk dapat melaksanakan operasi sesuai Prinsip-prinsip penanggulangan bencana yakni cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna; transparansi dan akuntabilitas; kemitraan, pemberdayaan, non diskriminatif, dan non proseliti.
- Prosedur tetap harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan dari rencana kontingensi.

## Lampiran lembar komitmen



Komitmen dalam hal ini meliputi komitmen untuk mengerahkan sumber daya dalam penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana direncanakan, dan komitmen untuk melaksanakan seluruh proses yang menjadi bagian penting dari penyusunan rencana kontingensi. Termasuk, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut:

1. Diseminasi Rencana Kontingensi
2. Uji coba Rencana Kontingensi melalui simulasi dan gladi
3. Pemutakhiran data secara berkala Rencana Kontingensi setidaknya-tidaknya sekali setiap tahun
4. Perpanjangan masa berlaku suatu Rencana Kontingensi apabila sampai pada akhir masa berlakunya bencana yang direncanakan tanggapan daruratnya tidak terjadi
5. Aktivasi dengan penyesuaian Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana pada saat terjadi bencana bukan yang direncanakan tanggapan daruratnya tetapi mempunyai karakteristik tanggapan darurat yang serupa
6. De-aktivasi Rencana Kontingensi dengan menyatakannya tidak berlaku jika sampai pada akhir masa berlakunya tidak terjadi bencana direncanakan tanggapan daruratnya dan menjadikannya sebagai lampiran Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana
7. Aktivasi kembali Rencana Kontingensi yang telah dinyatakan tidak berlaku untuk dapat dijadikan Rencana Operasi dengan pemutakhiran seperlunya jika sewaktu- waktu diperlukan

## 7. DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran berita acara penyusunan rencana kontingensi



Pada bagian ini, peserta penyusunan rencana kontingensi atau Kepala/Ketua/Koordinator SKPD/Organisasi/ Lembaga memberikan tanda tangan komitmen untuk menjalankan rencana kontingensi disaat keadaan darurat bencana terjadi dengan mengerahkan sumber daya – sumber daya yang diperlukan seperti yang tercantum dalam dokumen renkon yang telah disepakati.

*Format Isi Rencana Kontingensi Bencana*

## 7. DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran berita acara penyusunan rencana kontingensi



Narasi dapat seperti berikut:

(Contoh Judul) **BERITA ACARA PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI MENGHADAPI BENCANA GEMPABUMI AKIBAT SESAR LEMBANG**

Telah dilaksanakan lokakarya penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Menghadapi Bencana Gempabumi Akibat Sesar Lembang pada tanggal 20 s.d 24 Agustus 2019 di Kabupaten Bandung Barat. Lokakarya telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan dari Organisasi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Akademis.

Proses penyusunan dokumen telah menggunakan Data dan Informasi dari Lembaga yang berpartisipasi.

Format Isi Rencana Kontingensi Bencana

## 7. DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran berita acara penyusunan rencana kontingensi



<b>Nama</b> Jabatan& Instansi/lembaga	<b>Nama</b> Jabatan& Instansi/lembaga	<b>Nama</b> Jabatan& Instansi/lembaga
<b>Nama</b> Jabatan& Instansi/lembaga	<b>Nama</b> Jabatan& Instansi/lembaga	<b>Nama</b> Jabatan& Instansi/lembaga
<b>Nama</b> Jabatan& Instansi/lembaga	<b>Nama</b> Jabatan& Instansi/lembaga	<b>Nama</b> Jabatan& Instansi/lembaga
<b>Nama</b> Jabatan& Instansi/lembaga	<b>Nama</b> Jabatan& Instansi/lembaga	<b>Nama</b> Jabatan& Instansi/lembaga

*Format Isi Rencana Kontingensi Bencana*

## 7. DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran profil sumberdaya organisasi



Bagian ini berisikan sumberdaya-sumberdaya organisasi yang terlibat dalam penyusunan rencana kontingensi atau organisasi yang akan terlibat dalam penanganan darurat bencana.

## 7. DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran profil sumberdaya organisasi



- Form isian identifikasi sumberdaya adalah sebagaimana terlampir
- Masing-masing instansi harus memahami tugas-pokok dan fungsinya saat penanganan darurat bencana
- Nama lembaga / instansi adalah sesuai dengan nama lembaga / instansi
- Unit / Divisi adalah bagian



## Formulir Profil Organisasi & Sumber Daya Organisasi, Operasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana

### Profil Organisasi

Nama Organisasi	
Unit/Divisi/Bagian	
Alamat	
No. Telpon/Faksimili	
Email	
Narahubung (contact person)	
Jabatan	
No. Telpon	
No. Hp	
Email	
Tugas-fungsi organisasi (mandat)	*Ringkasan
Cakupan wilayah kerja	

*Format Isi Rencana Kontingensi  
Bencana*

7. DAFTAR LAMPIRAN-  
LAMPIRAN

Lampiran profil  
sumberdaya  
organisasi



### Sumber Daya Organisasi

#### Sumber Daya Manusia

No	Jenis Keahlian	Jumlah personil	Lokasi personil	Kontak	Keterangan

*Format Isi Rencana Kontingensi Bencana*

### 7. DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran profil sumberdaya organisasi



<b>Logistik (bahan/sediaan)</b>						
No	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

*Format Isi Rencana Kontingensi  
Bencana*

## 7. DAFTAR LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran profil  
sumberdaya  
organisasi



Tindak lanjut penyusunan rencana kontingensi

# FORMAT DOKUMEN RENKON



- Formalisasi
- Diseminasi Informasi dan Advokasi
- Uji Draft Dokumen Renkon (Simulasi)
- Opsi Tindak Lanjut

## FORMAT DOKUMEN RENKON formalisasi



- Rencana kontingensi merupakan acuan bersama (multi pihak) dalam bertindak disaat keadaan darurat bencana, sehingga memerlukan kekuatan hukum.
- Untuk itu maka renkon yang telah disusun bersama harus dikuatkan kedudukannya menjadi sebuah perda atau peraturan kepala daerah (Perbup atau Perwako).
- Penyusun dokumen renkon bersama BPBD harus memastikan hal ini.



FORMAT DOKUMEN RENKON

## Diseminasi Informasi dan Advokasi

Rencana kontinjensi tidak dirancang sebagai kegiatan akademik. Oleh sebab itu penyebarluasan dokumen menjadi sangat penting. Seperti juga produk resmi yang berkekuatan hukum, setelah diresmikan, rencana kontingensi menimbulkan konsekuensi hukum, maka pihak-pihak yang bersangkutan patut wajib diberitahu dan diberikan akses terhadap dokumen yang dimaksud.



FORMAT DOKUMEN RENKON

# Uji Draft Rencana Kontingensi

Patut diingat bahwa dalam perencanaan, tidak semua variabel dan indikator tersedia dengan sejelas-jelasnya. Sebelum diturunkan menjadi ketentuan peraturan, pengerahan sumberdaya, dan sebagainya, pada bagian ini disebutkan langkah apa saja yang dirancang untuk meningkatkan mutu, memperbaiki akurasi, dan melakukan asumsi-asumsi perencanaan.



FORMAT DOKUMEN RENKON

## Kaji Ulang Rencana Kontingensi

Dalam hal kejadian bencana yang dijadikan fokus perencanaan tidak seketika terjadi, dan situasi serta parameter serta variabel perencanaan berubah secara signifikan, bagian ini menjelaskan kapan dan bagaimana rencana kontingensi ini perlu dimutakhirkan melalui kaji ulang. Ketika sampai pada waktu tenggat dan masa berlaku rencana kontingensi, ternyata peristiwa yang dijadikan fokus perencanaan tidak terjadi, maka bagian ini akan menjelaskan opsinya:



## FORMAT DOKUMEN RENKON

# Kaji Ulang Rencana Kontingensi

### Ops I

Ancaman masih ada : rencana kontingensi diperpanjang masa

berlakunya sambil dilakukan kaji ulang sehingga menghasilkan

hitungan dan rancangan yang mutakhir,tetapi lebih kurang masih

sama shingga tidak diperlukan bongkar total

### Ops II

Ancaman masih ada dan secara dramatis berubah dimensinya.

Dalam hal ini maka diperlukan bongkar total

### Ops III

Ancaman tidak menja i prioritas lagi. Ini dapat terjadi ketika ancaman tidak lagi terlalu merisaukan, atau ada ancaman lain yang mempunyai peluang kejadian dan dampak yang secara signifikan memerlukan perhatian.

Dalam hal ini, dokumen kontingensi dapat diberlakukan “stand down” atau istirahat di tempat, tanggal berlakunya dihapus, komitmen resmi aset dan kegiatan dilepaskan, dan dokumen itu sendiri dijadikan lampiran dan menjadi acuan pada Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana (RPKB).



FORMAT DOKUMEN RENKON

## Aktivasi Rencana Kontingensi

Bagian ini memuat gambaran kondisi-kondisi yang harus terpenuhi untuk dapat mengaktivasi rencana kontingensi. Banyak dari parameter ini bersandar pada peringatan dini, sehingga ketika gejala meningkat dan bereskalasi menjadi bahaya, atau peristiwanya sungguh terjadi tanpa sepenuhnya terduga, maka menjadi jelas kapan dokumen kontingensi ini dapat diberlakukan.

Ditentukan pula mekanisme aktivasinya. Apakah melalui Surat keputusan kepala daerah, peraturan, atau mekanisme resmi lainnya, yang kemudian menguatkuasakan rencana Kontingensi untuk menjadi dasar rencana operasi.



FORMAT DOKUMEN RENKON

# Aktivasi Rencana Kontingensi

## **Hubungan Rencana Kontingensi Dengan Rencana Operasi**

Rencana operasi disusun sesaat setelah terjadi bencana berdasarkan rencana kontingensi yang sudah disepakati bersama, dengan mempertimbangkan masukan dari hasil kaji cepat lapangan. Rencana operasi disusun mengacu pada prosedur, struktur organisasi, jenis kegiatan serta ketersediaan sumberdaya, yang informasinya sudah teridentifikasi dalam rencana kontingensi dengan tetap memperhatikan besarnya eskalasi dampak bencana yang terjadi di lapangan.

# KONSEP OPERASI

Memuat **ruang lingkup** operasi tanggap darurat dan rencana tindakan yang akan dilakukan dalam **kerangka waktu** yang telah ditentukan (periode operasi). Tindakan ini fokus pada tanggap darurat – dan fase (**tahapan**) tanggap darurat yang sesuai skenario kejadian. Setiap tahap dijabarkan dalam tindakan-**tindakan** yang sesuai.

## Contoh

*Dilaksanakan dalam 3 tahap/fase yaitu tahap siaga darurat, tahap tanggap darurat, dan tahap transisi darurat. Tindakan dalam fase siaga darurat yakni:*

*Menyiagakan personil sesuai komponen- komponen dalam pengorganisasian dan tugas-tugas penanganan darurat bencana dan memutakhirkan prosedur tetap pelaksanaan tugas-tugas*

*Menyiagakan dan menguji (untuk memastikan berfungsinya) sistem peringatan dini, sistem komunikasi dan manajemen informasi yang terpadu dan mempunyai kemampuan interoperabilitas dengan semua pihak-pihak terkait*

*Menyiagakan/menyiapkan titik-titik kumpul/assembly points dan tempat tempat pengungsian sementara (Banjar, GOR, dsb) di lokasi aman.*

# PERINGATAN DINI

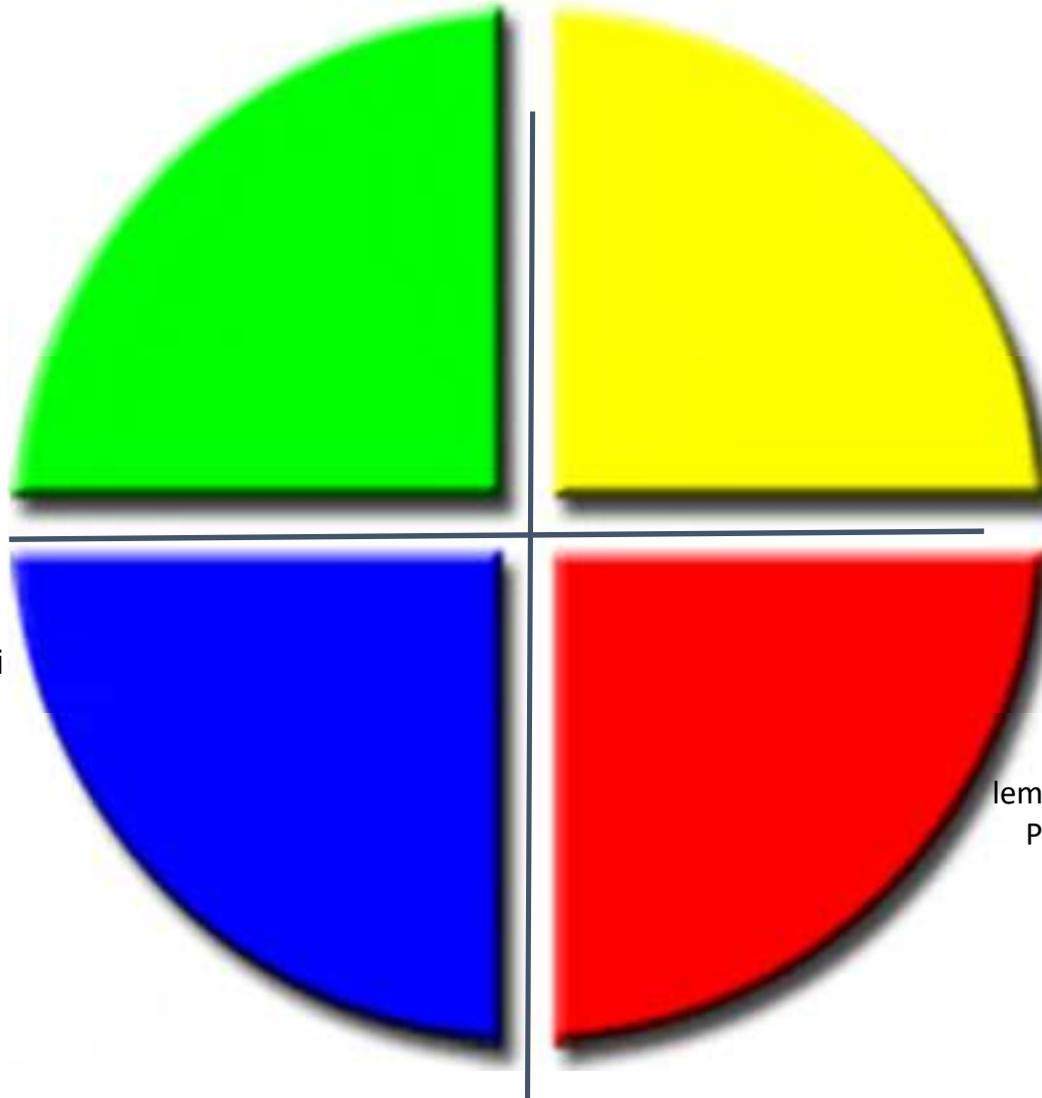
## PENGETAHUAN RISIKO

Risiko dianalisis, dipahami, dan dikomunikasikan secara luas kepada orang banyak.

## PEMANTAUAN BAHAYA & LAYANAN PERINGATAN

Konsep sistem peringatan dini dibuat, termasuk teknologi observasi dan format layanan peringatan.

Badan yang ditunjuk sebagai pusat layanan peringatan menentukan isi dan urutan peringatan termasuk saluran-saluran komunikasi yang dipakai untuk penyebaran peringatan ke pemerintah daerah dan masyarakat.



## PENYEBARAN DAN KOMUNIKASI

Informasi dan/atau peringatan serta arahan disebarkan, dengan ketentuan tanggung jawab aktor utama di dalam rantai peringatan. Perangkat komunikasi dibuat mampu sampai tepat pada waktunya.

Mengeluarkan dan menyebarkan peringatan dengan cepat, tepat sasaran, dan teruji secara ilmiah dan jelas.

## KEMAMPUAN RESPON

Kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga dibangun atau ditingkatkan. Peringatan-peringatan yang dibuat dapat memicu reaksi yang tepat sebelum bahaya datang.

# PROSEDUR PENETAPAN TINGKAT STATUS DARURAT BENCANA

## PROSEDUR PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT KABUPATEN/ KOTA

- Atas dasar informasi awal dari kaji cepat di tingkat kabupaten/ kota terdampak
- Paling lambat 24 jam setelah kaji cepat, dilakukan rapat koordinasi BPBD - instansi lembaga terkait penetapan status
- Paling lambat 24 jam setelah rekomendasi dikeluarkan, bupati/ walikota menetapkan status darurat bencana, dan penyusunan surat penetapan status keadaan darurat

## PROSEDUR PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT PROVINSI

- Apabila kebutuhan penanganan darurat melampaui kapasitas dari Kab/ Kota terdampak. Bupati menyampaikan surat kepada Gubernur.
- Paling lambat 1x24 jam surat pernyataan, BPBD provinsi dan SKPD/ Lembaga terkait melakukan kaji cepat.
- Hasil kaji cepat dibahas dalam rapat koordinasi tingkat provinsi untuk menghasilkan rekomendasi tindak lanjut
- Apabila hasil rekomendasi dirasa perlu menaikkan status bencana provinsi, paling lambat 1x24 jam Gubernur menetapkan status keadaan darurat
- Apabila hasil rekomendasi sebaliknya, maka Gubernur menginformasikan kepada Bupati walikota bahwa status bencana tidak perlu ditingkatkan menjadi bencana provinsi

## PROSEDUR PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT NASIONAL

- Apabila kebutuhan penanganan darurat melampaui kapasitas dari Provinsi yang wilayah Kab/ Kota terdampak. Gubernur menyampaikan surat kepada Presiden.
- Paling lambat 1x24 jam, setelah dikeluarkan surat, BNPB & K/L melakukan kajian cepat
- Hasil kaji cepat dibahas dalam rapat koordinasi tingkat nasional untuk menghasilkan rekomendasi tindak lanjut
- Apabila hasil rekomendasi dirasa perlu menaikkan status bencana nasional, paling lambat 1x24 jam presiden menetapkan status keadaan darurat
- Apabila hasil rekomendasi sebaliknya maka presiden menginformasikan kepada Gubernur bahwa status bencana tidak perlu ditingkatkan menjadi bencana provinsi

# Penetapan Tingkat Status Darurat Bencana

## STATUS KEADAAN DARURAT KABUPATEN/ KOTA

Dapat ditetapkan apabila Pemerintah Kab/ Kota masih memiliki kemampuan:

- Mobilisasi sumberdaya terkait dengan upaya penanganan darurat bencana meskipun kualitas dan kuantitas terbatas
- Mengaktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
- Melaksanakan penanganan awal keadaan darurat bencana

Ditetapkan keadaan darurat oleh Bupati/ Walikota

## STATUS KEADAAN DARURAT PROVINSI

Dapat ditetapkan apabila Pemerintah Kab/ Kota tidak memiliki kemampuan:

- Mobilisasi sumberdaya terkait dengan upaya penanganan darurat bencana meskipun kualitas dan kuantitas terbatas
- Mengaktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
- Melaksanakan penanganan awal keadaan darurat bencana, mencakup penyelamatan dan evakuasi korban terancam serta pemenuhan kebutuhan dasar

Ditentukan oleh pernyataan resmi bupati/ walikota tentang ketidakmampuan penanganan, hasil kaji cepat pemprov. Ditetapkan keadaan darurat oleh Gubernur

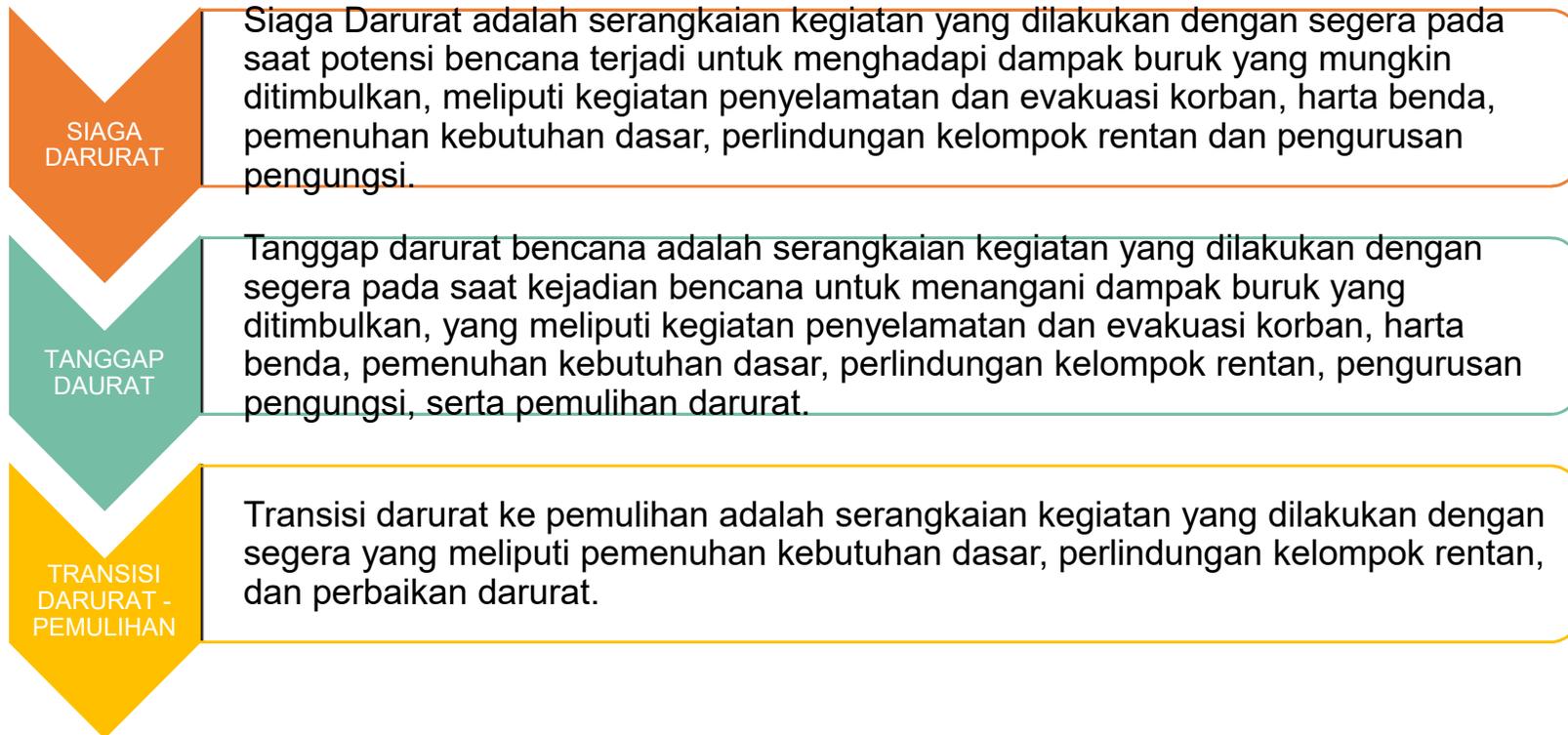
## STATUS KEADAAN DARURAT NASIONAL

Dapat ditetapkan apabila Pemerintah Provinsi tidak memiliki kemampuan:

- Mobilisasi sumberdaya terkait dengan upaya penanganan darurat bencana meskipun kualitas dan kuantitas terbatas
- Mengaktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
- Melaksanakan penanganan awal keadaan darurat bencana, mencakup penyelamatan dan evakuasi korban terancam serta pemenuhan kebutuhan dasar

Ditentukan oleh pernyataan resmi Gubernur tentang ketidakmampuan penanganan, hasil kaji cepat pemerintah dalam hal ini adalah BNPB dan K/L. Ditetapkan keadaan darurat oleh presiden

# TAHAPAN PENANGANAN DARURAT



### Siaga Darurat Bencana

Potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana

#### INDIKATOR

- Informasi potensi ancaman bencana
- Informasi ancaman kehidupan dan penghidupan

#### UPAYA PENANGANAN DARURAT BENCANA:

- Kaji Cepat
- Aktivasi Sistem Komando
- Evakuasi Masyarakat terancam
- Pemenuhan kebutuhan dasar
- Perlindungan kelompok rentan
- Pengendalian terhadap sumber ancaman bencana

### Status Tanggap Darurat

Ancaman bencana benar – benar terjadi dan telah mengganggu kehidupan penghidupan

#### INDIKATOR

- Informasi potensi ancaman bencana
- Informasi ancaman kehidupan dan penghidupan

#### UPAYA PENANGANAN DARURAT BENCANA:

- Kaji Cepat
- Aktivasi Sistem Komando
- Penyelamatan dan evakuasi korban
- Pemenuhan kebutuhan dasar
- Perlindungan kelompok rentan
- Pengendalian terhadap sumber ancaman bencana
- Perbaikan fungsi sarana prasarana vital

### Transisi darurat - Pemulihan

Ancaman bencana cenderung menurun, gangguan kehidupan penghidupan masih berlangsung

#### INDIKATOR

- Informasi potensi ancaman bencana
- Informasi ancaman kehidupan dan penghidupan

#### UPAYA PENANGANAN DARURAT BENCANA:

- Kaji Cepat perkembangan situasi
- Aktivasi Sistem Komando
- Evakuasi Masyarakat terancam
- Pemenuhan kebutuhan dasar
- Perlindungan kelompok rentan
- Perbaikan awal sosial dan ekonomi korban

## STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA





Terima kasih